



Artikel

Kompetensi Guru dan Dukungan Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Pojok Kependudukan pada Program Sekolah Siaga Kependudukan jenjang SMP Di Kabupaten Bandung Barat

Rustiyana Rustiyana¹

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat
Gedung A, Lantai 1, Kompleks Pemda Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang - Cisarua KM.3
rustiyana@gmail.com

Abstrak: Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) merupakan inisiatif strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menanamkan pemahaman kependudukan, Keluarga Berencana (KB), dan Pembangunan Keluarga (PKK) kepada generasi muda. Penelitian ini bertujuan menganalisis interaksi tiga variabel kunci dalam implementasi SSK di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Bandung Barat (KBB), sebuah wilayah yang menghadapi tantangan signifikan terkait pernikahan dini dan *stunting*. Variabel tersebut meliputi Kompetensi Guru, Dukungan Kepala Sekolah, dan efektivitas Pengelolaan Pojok Kependudukan. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, dengan fokus pada replikasi model sukses (seperti SMPN 2 Ngamprah, yang meraih Juara 2 Nasional Apresiasi SSK Tahun 2023). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun program menghadapi kendala sistemik umum (kurangnya anggaran dan koordinasi eksternal), Dukungan Kepala Sekolah yang efektif—terutama dalam peran Manajer (alokasi sumber daya internal) dan Supervisor (pengawasan integrasi kurikulum)—menjadi faktor mitigasi kritis. Dukungan ini secara langsung mendorong peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru, memfasilitasi inovasi (seperti penggunaan media interaktif Pojok Kependudukan) yang mengubah Pojok Kependudukan dari sekadar formalitas administratif menjadi pusat literasi dan pembelajaran aktif. Oleh karena itu, keberhasilan SSK di KBB sangat bergantung pada kapasitas Kepemimpinan Kepala Sekolah yang adaptif dan proaktif dalam pemberdayaan sumber daya manusia internal.

Kata Kunci: Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pojok Kependudukan, Kompetensi Guru, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Manajemen Pendidikan, Kabupaten Bandung Barat

Lisensi:

Hak Cipta (c) 2023 Jurnal
Karya Insan Pendidikan
Terpilih

Abstract: The Population Alert School (SSK) program is a strategic initiative by the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) to instill population knowledge, Family Planning (KB), and Family Development (PKK) in young people. This study analyzes the interaction of three key variables in SSK implementation at the Junior High School (SMP) level in West Bandung Regency (KBB), an area facing significant challenges related to early marriage and *stunting*. The variables include Teacher Competence, Principal Support, and the effectiveness of Population Corner Management. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews,



Artikel ini berlisensi *Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*.

observation, and document analysis, focusing on replicating successful models (such as SMPN 2 Ngamprah). The results indicate that although the program faces common systemic constraints (lack of budget and external coordination), effective Principal Support—especially in the roles of Manager (internal resource allocation) and Supervisor (curriculum integration oversight)—is the critical mitigating factor. This support directly enhances Teachers' Pedagogical Competence, facilitating innovation (such as the use of interactive Population Corner media) that transforms the Population Corner from a mere administrative formality into a centre for active literacy and learning. Therefore, the success of SSK in KBB heavily relies on the adaptive and proactive capacity of School Principal Leadership in empowering internal human resources

Keywords: *Population Alert School (SSK), Population Corner, Teacher Competence, Principal Leadership, School Management, West Bandung Regency*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Konteks Kebijakan SSK

Pembangunan kependudukan dan keluarga (PKK) telah menjadi perhatian utama dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Indonesia, mengingat laju pertumbuhan penduduk yang signifikan dan tantangan kualitas sumber daya manusia (SDM) (Lyedya, Arsyad, & Hasbiyah, 2024; Widyanto, Dahliana, & Syauqi, 2019). Isu-isu kritis seperti tingginya angka pernikahan dini, pergaulan bebas remaja, dan *stunting* menuntut adanya intervensi edukatif yang terencana dan sistematis sejak usia sekolah (Hernawan, Panji., 2025; Kemendagri, 2022). Berangkat dari kesadaran ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencanangkan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) (Widyanto, Dahliana, & Syauqi, 2019).

SSK didefinisikan sebagai institusi pendidikan formal yang mengintegrasikan materi kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam kurikulum (BKKBN, 2017; Widyanto, Dahliana, & Syauqi, 2019). Tujuan utama SSK adalah menumbuhkan pemahaman, kesadaran, dan sikap yang berwawasan kependudukan pada generasi muda, sehingga mereka dapat menjadi Generasi Berencana (GenRe) yang mampu merencanakan masa depan mereka secara matang (DP3AP2 DIY, 2024).

Secara operasional, program SSK diimplementasikan melalui dua pilar utama (BKKBN, 2017). Pertama, integrasi materi kependudukan ke dalam beberapa mata pelajaran yang relevan (seperti Geografi, Sosiologi, atau Biologi) tanpa menambah jam pelajaran formal (Widyanto, Dahliana, & Syauqi, 2019). Kedua, pembentukan **Pojok Kependudukan (PK)** sebagai sarana literasi dan sumber belajar mandiri bagi peserta didik, yang harus memuat informasi mengenai kependudukan, mulai dari data demografi lokal hingga isu kesehatan reproduksi dan pernikahan dini (BKKBN, 2017). Keberhasilan program secara keseluruhan sangat bergantung pada kualitas implementasi kedua pilar ini (Widyanto, Dahliana, & Syauqi, 2019).

1.2. Fokus Studi Kasus di Kabupaten Bandung Barat (KBB)

Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyediakan lingkungan studi kasus yang unik dan penting (Hernawan, Panji., 2025). Pemerintah Kabupaten, melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), menunjukkan komitmen kebijakan yang kuat dengan menetapkan seluruh 201 SMP (negeri dan swasta) sebagai SSK hingga tahun 2025 (Hernawan, Panji., 2025). Cakupan yang masif ini menggeser fokus analisis dari pertanyaan *apakah* program berjalan menjadi *bagaimana* program dapat berjalan dengan kualitas optimal di tengah keterbatasan sumber daya (BKKBN Pusat, 2018).

KBB menghadapi tantangan kependudukan yang kompleks, khususnya masalah pernikahan dini dan *stunting*, yang memerlukan intervensi edukatif yang sangat sensitif dan efektif (Hernawan, Panji., 2025; Kemendagri, 2022). Untuk mengatasi masalah ini, SSK di KBB dituntut untuk menghasilkan luaran yang melampaui peningkatan pengetahuan kognitif, yaitu perubahan sikap dan perilaku siswa untuk melakukan perencanaan hidup yang bertanggung jawab (DP3AP2 DIY, 2024). Studi ini secara khusus mencermati keberhasilan SMPN 2 Ngamprah, yang telah diakui sebagai sekolah model dan meraih Juara 2 Nasional Apresiasi SSK Tahun 2023, yang mekanisme di balik keberhasilan sekolah model ini perlu diurai untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang dapat direplikasi di SMP lain di KBB (BKKBN Pusat, 2018; Hernawan, Panji., 2025).

1.3. Fokus Kritis: Interaksi Tiga Variabel Utama

Keberhasilan SSK dalam membentuk Generasi Berencana sangat dipengaruhi oleh kualitas pengajaran guru dan dukungan kelembagaan (Kemendagri, 2022; Lyedya, Arsyad, & Hasbiyah, 2024). Penelitian ini secara spesifik menganalisis interaksi tiga variabel kunci: **Kompetensi Guru** (meliputi aspek pedagogik dan profesionalisme) (Riandhana, 2017), **Dukungan Kepala Sekolah** (terutama peran manajerial dan kepemimpinan instruksional) (Mufarrohatul A'yun & Muttaqin, 2025), dan efektivitas **Pengelolaan Pojok Kependudukan (PK)** (Kemendagri, 2022).

Ditemukan bahwa pengelolaan Pojok Kependudukan—sebagai penanda fisik program SSK—seringkali hanya bersifat formalitas administrasi, tanpa menghasilkan aktivitas pembelajaran yang substansial (Lyedya, Arsyad, & Hasbiyah, 2024). Hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah bahwa pengelolaan Pojok Kependudukan yang fungsional, dinamis, dan berkontribusi terhadap literasi siswa di KBB adalah cerminan langsung dari kualitas kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mengelola alokasi sumber daya dan membina kompetensi pedagogik guru, terutama ketika dukungan eksternal (anggaran dan koordinasi) bersifat kurang memadai (Lyedya, Arsyad, & Hasbiyah, 2024).

2. METODE PENELITIAN

2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis **Studi Kasus Multipel Terpilih** (*Multiple Case Study*) pada beberapa SMP yang telah menerapkan program Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Bandung Barat (Prasetyono, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan deskripsi mendalam dan holistik mengenai fenomena yang diteliti, yaitu kompleksitas interaksi antara kompetensi guru, peran kepala sekolah, dan pengelolaan Pojok Kependudukan (Sudrajat & Mujadidi, 2023). Untuk mencapai kedalaman analisis yang dimaksud, penelitian kualitatif akan mengeksplorasi secara sistematis tindakan yang dilakukan oleh instansi atau organisasi tertentu dalam pelaksanaan program SSK di lapangan (Prasetyono, 2024).

2.2. Lokasi, Subjek, dan Informan

Lokasi penelitian adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi pelaksana program SSK di Kabupaten Bandung Barat (Hernawan, Panji., 2025). Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, mencakup semua pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan SSK (Lyedya, Arsyad, & Hasbiyah, 2024).

Informan kunci terdiri dari Kepala Sekolah (bertanggung jawab atas kebijakan kelembagaan dan supervisi) dan Guru (pengelola SSK dan Pojok Kependudukan), serta Perwakilan Dinas terkait (DP2KBP3A KBB) (Sanjaya, Fahmi, & Sapuadi,

2025). Pemilihan subjek didasarkan pada pertimbangan kesesuaian antara apa yang diteliti dengan informan/narasumber (Sudrajat & Mujadidi, 2023).

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memastikan kedalaman dan keabsahan data, dilakukan **triangulasi teknik** pengumpulan data, mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sudrajat & Mujadidi, 2023). **Wawancara Mendalam** (*In-Depth Interview*) digunakan untuk menggali informasi tentang strategi kepemimpinan Kepala Sekolah (misalnya, alokasi dana BOS untuk PK) dan pengalaman guru dalam merancang media pembelajaran inovatif untuk Pojok Kependudukan (Sanjaya, Fahmi, & Sapuadi, 2025; Rafli, 2023). **Observasi Non-Partisan** mencakup pengamatan langsung terhadap kondisi fisik Pojok Kependudukan, ketersediaan materi, dan frekuensi penggunaannya oleh siswa (Rafli, 2023). Terakhir, **Dokumentasi** berupa SK Kepala Sekolah, RPP yang terintegrasi, dan laporan program digunakan sebagai data pendukung sekunder (Sudrajat & Mujadidi, 2023).

2.4. Teknik Analisis Data

Analisis Data dilakukan dengan teknik analisis data interaktif model **Miles, Huberman, dan Saldana** (Miles, Huberman, & Saldana, 1992). Tahapan analisis meliputi: (1) **Pengumpulan Data** (seluruh data dicatat secara sistematis); (2) **Reduksi Data** (memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah) (Miles, Huberman, & Saldana, 1992); (3) **Penyajian Data** (data diorganisasi dalam bentuk narasi dan tabel untuk mempermudah penarikan kesimpulan); dan (4) **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi** (penentuan makna dari data yang disajikan melalui pengecekan keabsahan data menggunakan **triangulasi teknik**) (Miles, Huberman, & Saldana, 1992).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ketersediaan dan Kualitas Pengelolaan Pojok Kependudukan (PK)

Pojok Kependudukan (PK) adalah komponen wajib SSK, berfungsi sebagai sarana literasi dan sumber belajar mandiri yang memuat materi kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Widyanto, Dahliana, & Syauqi, 2019; Kemendagri, 2022). Dalam konteks SSK, PK merupakan penanda utama kepatuhan

program (Widyanto, Dahliana, & Syauqi, 2019). Namun, analisis menunjukkan adanya risiko signifikan bahwa PK hanya memenuhi standar SSK kategori Dasar (sekadar ada di perpustakaan) tanpa mencapai fungsionalitas SSK kategori Paripurna (memiliki ruang tersendiri yang digunakan secara aktif) (Rafli, 2023).

Fungsionalitas PK di SMP KBB terbukti sangat bergantung pada intervensi internal sekolah, dan ketika PK hanya dipandang sebagai syarat administrasi, kualitasnya akan terhambat oleh kurangnya dana spesifik dan ketiadaan inovasi pedagogik dari guru (Lyedya, Arsyad, & Hasbiyah, 2024). Keberadaan PK yang sukses harus diukur dari *tingkat utilitasnya* dan dampak nyata pada literasi siswa (Kemendagri, 2022). Keberhasilan ini menuntut guru SSK untuk mengolah data kependudukan lokal (misalnya, data pernikahan dini di KBB) menjadi media yang menarik, yang selanjutnya diimplementasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler (PIK-R) dan penugasan kelas (Kemendagri, 2022; Rafli, 2023). Guru dituntut untuk memiliki Kompetensi Profesional yang tinggi dalam penguasaan konten kependudukan (Riandhana, 2017), sementara Kompetensi Pedagogik yang baik akan menciptakan *Aktivitas Pembelajaran* yang inovatif di Pojok Kependudukan (Aliimu, Sumardjoko, & Anshori, 2025).

Dimensi Kinerja Pojok Kependudukan	Indikator Kualitatif	Peran Kunci Guru SSK	Aspek Kompetensi Guru
Ketersediaan Sumber Daya (Input)	Kelengkapan materi cetak/digital, <i>up-to-date</i> (data kependudukan lokal KBB)	Pengelola Pojok	Profesional (Penguasaan konten terkini) (Riandhana, 2017)
Aktivitas Pembelajaran (Proses)	Frekuensi penggunaan Pojok untuk kegiatan kelompok/proyek, penggunaan media inovatif (Games/Digital)	Guru Mata Pelajaran (Integrasi RPP)	Pedagogik (Metode pembelajaran/Inovasi) (Aliimu, Sumardjoko, & Anshori, 2025)
Keterlibatan Siswa (Output)	Pembentukan/keaktifan PIK-R, jumlah karya siswa dipajang (mading/buletin), perubahan sikap remaja (Minat GenRe)	Guru BK/PIK-R dan Guru Kelas	Sosial/Kepribadian (Motivasi dan bimbingan) (Kemendagri, 2022)

3.2. Peran Kualitas Kepemimpinan Kepala Sekolah (Dukungan Kelembagaan)

Kepemimpinan Kepala Sekolah memegang peranan krusial sebagai penentu keberhasilan SSK, terutama dalam menyediakan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan (Lyedya, Arsyad, & Hasbiyah, 2024; Mufarrohatul A'yun & Muttaqin, 2025). Kepala sekolah yang efektif harus mampu menjalankan tujuh peran utama (EMASLIM: Edukator, Manajer, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, Motivator) untuk memastikan SSK terintegrasi dengan baik dalam ekosistem sekolah (Mufarrohatul A'yun & Muttaqin, 2025; Aliimu, Sumardjoko, & Anshori, 2025).

Kepsek sebagai Manajer dan Administrator (Mitigasi Anggaran)

Program SSK di KBB sering dihadapkan pada kendala kurangnya dana dan fasilitas spesifik (Lyedya, Arsyad, & Hasbiyah, 2024). Kepala Sekolah yang berhasil menunjukkan peran penting sebagai Manajer dan Administrator Sumber Daya (Mufarrohatul A'yun & Muttaqin, 2025). Mereka harus mampu mengalokasikan sumber daya internal, seperti Dana BOS, untuk pengadaan dan pemeliharaan Pojok Kependudukan (PK) serta mendukung biaya operasional guru yang terlibat (Mufarrohatul A'yun & Muttaqin, 2025). Kemampuan Kepsek untuk menutupi defisit anggaran eksternal melalui efisiensi administrasi internal merupakan faktor yang membedakan sekolah yang sukses dari yang kurang optimal (Lyedya, Arsyad, & Hasbiyah, 2024).

Kepsek sebagai Supervisor (Jaminan Kualitas Pedagogik)

Sebagai Supervisor, Kepala Sekolah bertanggung jawab untuk memantau dan membina guru dalam melaksanakan tugas mengajar (Tadius J., Sindju, & Djudin, 2017). Dalam implementasi SSK, Kepsek harus melakukan supervisi akademik yang terstruktur untuk memastikan integrasi materi kependudukan dalam RPP dilakukan dengan kualitas yang tinggi dan terdokumentasi (Sanjaya, Fahmi, & Sapuadi, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa Kepsek perlu memformalkan instrumen supervisi Pojok Kependudukan dan integrasi kurikulum SSK untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas pedagogik guru (Tadius J., Sindju, & Djudin, 2017; Aliimu, Sumardjoko, & Anshori, 2025).

Kepsek sebagai Motivator dan Leader (Pendorong Kompetensi Guru)

Kepala Sekolah yang visioner bertindak sebagai Leader dan Motivator, mendorong pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan (Mufarrohatul A'yun & Muttaqin, 2025). Mekanisme penting yang dapat didorong oleh Kepsek adalah pembentukan **Komunitas Belajar (KOMBEL)** SSK/GenRe di tingkat sekolah (Sanjaya, Fahmi, & Sapuadi, 2025). Forum internal ini berfungsi sebagai wadah bagi guru untuk berbagi praktik terbaik dan menciptakan inovasi media Pojok Kependudukan yang lebih menarik dan relevan bagi siswa SMP (Aliimu, Sumardjoko, & Anshori, 2025). Dengan memberdayakan kapasitas internal ini, Kepsek mampu mengimbangi kelemahan koordinasi dan dukungan teknis dari pihak eksternal (Mufarrohatul A'yun & Muttaqin, 2025).

Peran Kepala Sekolah (Fungsi)	Mekanisme Dukungan Implementasi SSK	Dampak pada Kompetensi Guru & Pengelolaan Pojok Kependudukan	Rujukan
Manajer/Administrator	Mengalokasikan dana BOS/Komite untuk pengadaan fasilitas Pojok dan pelatihan guru SSK, memastikan legalitas program (SK)	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana (Pojok Kependudukan), dukungan sumber daya profesional guru	(Mufarrohatul A'yun & Muttaqin, 2025; Sanjaya, Fahmi, & Sapuadi, 2025)
Supervisor	Melaksanakan supervisi akademik RPP guru untuk memastikan integrasi materi kependudukan yang berkualitas dan terdokumentasi	Peningkatan kualitas Kompetensi Pedagogik (perancangan dan metode pengajaran SSK di kelas)	(Sanjaya, Fahmi, & Sapuadi, 2025; Tadius J., Sindju, & Djudin, 2017)
Motivator / Leader	Membentuk Komunitas Belajar (KOMBEL/ MGMP) SSK/GenRe, mendorong inovasi pedagogik guru	Peningkatan Kompetensi Profesional dan Pedagogik Guru (melalui kolaborasi dan motivasi), kreativitas pengelolaan Pojok	(Mufarrohatul A'yun & Muttaqin, 2025; Aliimu, Sumardjoko, & Anshori, 2025)
Inovator	Mendorong penggunaan media digital/games dalam Pojok Kependudukan untuk mengatasi kejenuhan materi	Peningkatan kreativitas guru dalam memanfaatkan Pojok sebagai pusat pembelajaran	(Rafli, 2023; Kemendagri, 2022)

	kependudukan	interaktif	
--	--------------	------------	--

3.3. Kompetensi Guru dan Inovasi Pedagogik dalam Pengelolaan Pojok Kependudukan

Kompetensi guru merupakan inti dari keberhasilan pedagogis SSK (Riandhana, 2017). Guru yang mengelola Pojok Kependudukan dituntut untuk memiliki Kompetensi Profesional dalam penguasaan konten kependudukan yang luas dan mendalam (Riandhana, 2017). Lebih penting lagi, diperlukan **Kompetensi Pedagogik** untuk menyajikan materi SSK dengan cara yang efektif dan relevan bagi remaja SMP (Aliimu, Sumardjoko, & Anshori, 2025).

Materi kependudukan seringkali dianggap siswa SMP sebagai subjek yang "terlalu luas dan banyak hafalan", sehingga mengharuskan guru untuk menjadi inovator dan desainer pembelajaran (Ulfah, 2021). Pojok Kependudukan berfungsi sebagai laboratorium tempat guru mengimplementasikan media interaktif untuk mengatasi kejenuhan ini (Kemendagri, 2022). Inovasi dapat berupa pengembangan *games* (seperti ular tangga kependudukan), majalah dinding yang dikelola siswa, atau media Edukependudukan Digital (Rafli, 2023; Ulfah, 2021).

Peran Pojok Kependudukan di sini bukan hanya sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi sebagai katalisator pengembangan profesional guru (Kemendagri, 2022). Dukungan Kepala Sekolah dalam memfasilitasi forum internal (KOMBEL/MGMP) memungkinkan guru untuk berkolaborasi dan berbagi temuan tentang media PK yang paling berhasil menarik minat siswa (Mufarrohatul A'yun & Muttaqin, 2025; Sanjaya, Fahmi, & Sapuadi, 2025). Siklus pengembangan ini memastikan bahwa peningkatan Kompetensi Guru (Pedagogik dan Profesional) terus berkelanjutan dan terfokus pada hasil program SSK (Aliimu, Sumardjoko, & Anshori, 2025).

3.4. Kendala Sistemik dan Kebutuhan Dukungan Lintas Institusi

Meskipun Dukungan Kepala Sekolah di KBB terbukti adaptif, terdapat kendala sistemik yang menghambat optimalisasi program, di antaranya kekurangan dana operasional yang konsisten dan terbatasnya fasilitas fisik pendukung Pojok Kependudukan (Lyedy, Arsyad, & Hasbiyah,

2024). Lebih jauh, terlihat adanya **kelemahan dalam koordinasi antar institusi** (Lyedya, Arsyad, & Hasbiyah, 2024). Kurangnya komunikasi yang efektif dan pendampingan yang mendalam dari dinas terkait kepada pengelola SSK di sekolah menyebabkan sekolah seringkali berjalan sendiri tanpa pengawasan atau tindak lanjut yang sistematis (Widyanto, Dahliana, & Syaqui, 2019).

Keterbatasan ini menempatkan Kepala Sekolah dalam peran *Leader* dan *Inovator* yang harus mengisi kekosongan tersebut, seringkali dengan menggunakan sumber daya internal sekolah (KOMBEL/MGMP) untuk pelatihan dan inovasi mandiri (Mufarrohatul A'yun & Muttaqin, 2025; Lyedya, Arsyad, & Hasbiyah, 2024). Untuk memastikan keberlanjutan SSK di 201 SMP KBB, diperlukan penguatan koordinasi eksternal, di mana DP2KBP3A dan BKKBN (sebagai *Elite Politik*) harus menyediakan pendampingan teknis yang berkelanjutan dan instrumen evaluasi yang lebih terfokus pada dampak (Lyedya, Arsyad, & Hasbiyah, 2024).

Faktor Kunci (Penyebab)	Mekanisme Penghubung	Hasil Implementasi (Dampak)	Keterangan Kausalitas
Dukungan Kepala Sekolah (Manajer/ Supervisor)	Alokasi Dana (Manajer) & Pembinaan (Supervisor)	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Pojok Kependudukan	Dukungan finansial dan manajerial Kepsek memastikan Pojok Kependudukan memiliki sarana prasarana yang memadai (Mufarrohatul A'yun & Muttaqin, 2025; Lyedya, Arsyad, & Hasbiyah, 2024).
Peningkatan Kompetensi Guru (Pedagogik/ Inovasi)	Kreativitas Pemanfaatan Media dan Integrasi RPP	Peningkatan Pemanfaatan dan Fungsi Pojok Kependudukan oleh Siswa	Kompetensi guru mengubah Pojok dari fasilitas pasif menjadi pusat pembelajaran aktif (Kemendagri, 2022; Ulfah, 2021).
Kurangnya Koordinasi DPPKB/ Dinas	Kepemimpinan Adaptif Kepala Sekolah	Penggunaan Sumber Daya Internal (KOMBEL/MGMP) dan Inovasi Mandiri	Kepsek sebagai Leader/Inovator mengisi kekosongan dukungan eksternal melalui pemberdayaan kapasitas internal sekolah (Mufarrohatul A'yun &

Faktor Kunci (Penyebab)	Mekanisme Penghubung	Hasil Implementasi (Dampak)	Keterangan Kausalitas
			Muttaqin, 2025; Kemendagri, 2022).

4. PENUTUP

4.1. Simpulan

Keberhasilan implementasi program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), khususnya dalam pengelolaan Pojok Kependudukan (PK) di jenjang SMP Kabupaten Bandung Barat, merupakan hasil sinergi yang kuat antara dukungan kelembagaan internal dan kapasitas profesional guru. Meskipun program ini secara konsisten menghadapi kendala sistemik seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi eksternal, Kepemimpinan Kepala Sekolah yang adaptif dan proaktif terbukti menjadi faktor mitigasi yang kritikal. Kepala Sekolah menjalankan peran Manajer dengan mengalokasikan sumber daya secara strategis untuk PK, dan peran Supervisor untuk menjamin kualitas integrasi materi kependudukan dalam pembelajaran. Dukungan ini memicu peningkatan Kompetensi Pedagogik guru, yang diwujudkan melalui inovasi kreatif dalam pemanfaatan Pojok Kependudukan. Dengan demikian, Pojok Kependudukan yang fungsional di KBB adalah cerminan langsung dari Kapasitas Kepala Sekolah dalam memberdayakan SDM internalnya, yang menjadi kunci keberhasilan SSK dalam membentuk Generasi Berencana dan merespons isu kependudukan lokal.

4.2. Saran-saran

1. Bagi DP2KBP3A KBB dan Dinas Pendidikan, harus ada penguatan koordinasi yang berkelanjutan, beralih dari sekadar sosialisasi menjadi pendampingan teknis dan monitoring mendalam. Institusi terkait perlu memformalkan instrumen Asesmen Kinerja SSK yang fokus pada kualitatif fungsionalitas Pojok Kependudukan (kategori Paripurna) dan dampak perilaku siswa, bukan hanya kelengkapan dokumen administratif. Selain itu, penyediaan materi SSK, khususnya data kependudukan lokal KBB yang terkini, perlu dijamin agar Pojok Kependudukan memiliki relevansi yang tinggi.
2. Bagi Kepala Sekolah SMP KBB, diperlukan optimalisasi peran Manajer/Administrator

untuk menjamin alokasi dana internal, seperti Dana BOS, bagi pemeliharaan dan pengayaan Pojok Kependudukan sebagai pusat literasi yang vital. Kepala Sekolah juga harus secara rutin menggunakan peran Supervisor untuk memonitor RPP dan mewajibkan guru mendokumentasikan inovasi Pedagogik SSK, serta terus memfasilitasi forum Komunitas Belajar (KOMBEL) guru SSK untuk memicu kolaborasi profesional.

3. Bagi Guru Pengelola SSK, Guru perlu memfokuskan pengembangan Kompetensi Pedagogik dan Inovatif (Ulfah, 2021). Diperlukan upaya untuk mengubah materi kependudukan yang bersifat teoritis menjadi media interaktif dan digital (Edukependudukan Digital, *games*) yang memanfaatkan Pojok Kependudukan. Strategi ini sangat penting untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMP dan memastikan materi SSK dapat diinternalisasi menjadi perubahan sikap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Kepala Sekolah dan tim pengelola Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri Kabupaten Bandung Barat yang telah berpartisipasi aktif dalam penelitian ini. Apresiasi khusus juga disampaikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat atas dukungan data dan fasilitasi selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Aliimu, B. N., Sumardjoko, B., & Anshori, A. (2025). Peran Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru di SMPN 1 Kedawung. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(2), 517–543.
<https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5901>

BKKBN. (2017). *Pedoman pengelolaan pendidikan kependudukan melalui sekolah siaga kependudukan (SSK) di SMP, SMA dan sederajat*. Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan.

BKKBN Pusat. (2018). *Berita: BKKBN Kembangkan Model Sekolah Siaga*

Kependudukan (SSK) di 108 Sekolah Se-Jawa Barat.

DP3AP2 DIY. (2024). *Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) membentuk Generasi Emas 2045*. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY.
<https://dp3ap2.jogjapro.go.id/blog/Sekolah-Siaga-Kependudukan-%28SSK%29-membentuk-Generasi-Emas-2045?653>

Kemendagri. (2022). *SSK: Inovasi Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan*. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Lyedya, N., Arsyad, M., & Hasbiyah, S. (2024). Implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), 158–164.
<https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PJ/article/view/490>

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).

Mufarrohatul A'yun, N. I., & Muttaqin, M. I. (2025). Peran Kualitas Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Peningkatan Profesionalisme Guru. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(1), 206–217.
<https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i1.334>

Hernawan, Panji (2025). *DP2KBP3A Terus Perkuat Program Sekolah Siaga Kependudukan di Bandung Barat*. Bipol.co.
<https://bipol.co/2025/11/10/dp2kbp3a-136872.html>

Prasetyono, D. A. (2024). *Penguatan Keadaban Kewarganegaraan (Civic Virtue) melalui Sekolah Siaga Kependudukan (Studi Kasus di SMP Negeri 4 Bandung)*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Rafli, M. M. (2023). *Implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan Pada*

Sekolah di Wilayah Surabaya Selatan.
Laporan Magang MBKM FKM UNAIR.
<https://repository.unair.ac.id/130848/>

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32218/>

Riandhana, T. E. (2017). Pengaruh Kompetensi Pedagogik Dan Kompetensi Profesional Guru Terhadap Pembelajaran IPS Di SMP Negeri Se-Kota Palu. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 19(1), 49-56.
https://www.researchgate.net/publication/329984317_PENGARUH_KOMPETENSI_PEDAGOGIK_DAN_KOMPETENSI_PROFESSIONAL_GURU_TERHADAP_PEMBELAJARAN_IPS_DI_SMP_NEGERI_KOTA_PALU

Sanjaya, A., Fahmi, & Sapuadi. (2025). Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Utara. *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 299–309.
<https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.5385>

Sudrajat, & Mujadidi, S. (2023). Implementasi program sekolah siaga kependudukan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. *JIPSINDO (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Indonesia)*, 10(2), 100–114.
<https://doi.org/10.21831/jipsindo.v10i2.63743>

Tadius J, Sindju, H. B., & Djudin, T. (2017). Peranan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru (Studi tentang Peranan Kepala Sekolah Dasar Negeri 7 Sintang). *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 6(4), 1–17.
<https://doi.org/10.26418/jppk.v3i1.4383>

Ulfah, R. (2021). Implementasi sekolah siaga kependudukan melalui pembelajaran geografi di MAN Insan Cendekia Tanah Laut. *Jurnal Geografika: Geografi Lingkungan Lahan Basah*, 2(2), 91–100.
<https://doi.org/10.20527/jgp.v2i2.5013>

Widyanto, A., Dahliana, S., & Syauqi, M. (2019). *Konseptualisasi Integrasi Materi Kependudukan Dalam Pendidikan Agama Islam Melalui Program Sekolah Siaga Kependudukan Di Indonesia*. Laporan Penelitian UIN Ar-Raniry Banda Aceh.